Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies
Vol. XIX, No. 1, January-June 2019, p. 91-98
Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id
ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online)
Received: June 2019; Accepted: June 2019; Published: June 2019

Konsep Dasar Ekonomi Pendidikan pada Tataran Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

Irjus Indrawan
Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau

Abstract: *Education is a conscious and planned effort to create an atmosphere of learning and learning process so that students actively develop their potential. Education is a basic need factor for every human being so that efforts to educate the life of the nation, because through education efforts to improve people's welfare can be realized. The politics of education is all efforts, policies and strategies related to the problem of education. The politics of education is a general explanation or understanding determined by the highest education authority to direct ideas and determine actions with educational devices in various similarities and diversity along with the objectives and programs to realize them. The politics of education contains the policies of a country's government regarding education. The politics of education is not only in the form of written laws and regulations, but also includes other policies relating to education. The politics of education is aimed at the success of education providers that are run for the achievement of the goals of the state, because the goals of the state are the main targets in the administration of education.*
Keywords: *Educational Economics; Political Superstructure-Infrastructure.*

Abstrak: Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Politik pendidikan merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikian dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan yang dijalankan demi tercapainya tujuan negara, karena tujuan negara menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kata-kata kunci: Ekonomi Pendidikan; Suprastruktur-Infrastruktur Politik.

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah proses pendidikan dapat dilaksanakan baik melalui lembaga pendidikan informal maupun formal. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Dengan demikian Sistem pendidikan bisa dipahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.[1]

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah, negara Indonesia mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber dana pendidikan. Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode. *Pertama* kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan; *Kedua*, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama; *Ketiga* kebijakan politik pemerintahan Indonesia masa Orde Baru; dan *keempat* kebijakan poltik pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu; sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa; ”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pennyelenggaraan pendidikan nasional”. Dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan

[1] Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kalam Mulia. 2006. hal 3

baik apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah. Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah). Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Dalam mengkaji sistem pendidikan dalam suatu negara tidak terlepas dari falasafah suatu bangsa tersebut. Ketika negar-negara barat mempunya falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis maka sistem pendidikan yang dibuat oleh barat tentu bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[2]

II. Ekonomi Pendidikan

Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari masalah pembangunan. Konsep pebangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung dari penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan yang kemudian dikenal dengan istilah *invesment inhuman capital*. Dewasa ini berkembang teori modal manusia (*teory human capital*) menjelaskan proses pendidikan yang memiliki proses positif pada pertumbuhan ekonomi.

Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi fisik lainnya. Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun tidak langsung menghubungkan indicator pendidikan dan indicator ekonomi, seperti model fungsi produksi. Asumsi dasar yang melandasi keharusan adanya hubungan pendidikan dengan penyiapan

[2] Imam Barnadib. *Filsafat Pendidikan; Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan.* Yogyakarta: Studying, 1982. hal. 19.

tenaga kerja adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan dan pengetahuan untuk bekerja.

Dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia, sudah tentu pendidikan itu tidak akan membawa peserta didik kearah hidup yang membingungkan, menyusahkan dan sengsara walaupun bisa mencari uang banyak. Ekonomi merupakan salah satu landasan yang memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan dibagi menjadai dua yaitu peran prinsipil dan peran material. Secara prinsipil peran tersebut meliputi prinsip-prinsip ekonomi yang dapat diaplikasikan dalam implementasi pendidikan, sementara itu secara material peran ekonomi berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Sehingga pada akhirnya antara ekonomi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat.

Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat.

.

III. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap Negara, Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik. Hubungan tersebut adalah realitas yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia. Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), dan peranan politik kaum cendikia (*the political role of the intelligentsia*). [3]

Era reformasi membentuk dan menetapkan beberapa hal seperti politik yang terus ada hingga sekarang. Secara pengertian suprastruktur politik memiliki definisi lembaga kenegaraan yang secara absah mengidentifikasikan segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Lembaga-lembaga tersebut terbagi menjadi tiga sesuai , yaitu: (a). Lembaga Legislatif; Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah ada DPD. Sedangkan untuk majelisnya ada MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan berbeda. DPR mempunyai fungsi membentuk UU, membahas RAPBN bersama presiden secara garis besar 3 fungsi

[3] Albernethy, David dan Coombe, Trevor. *Education and Politics in Developing Countries*. Havard Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965. hal. 287

utamanya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan untuk DPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU tertentu dan pengusul dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden. (b). Lembaga Eksekutif; Kekuasaannya berada di tangan presiden serta dibantu wakil presiden beserta menteri dan bawahannya lainnya untuk berfungsi memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, serta bisa menetapkan peraturan pemerintahan untuk kemaslahatan bersama. (c). Lembaga Yudikatif; Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Insfektif. Mereka berfungsi dan bertujuan sebagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Sedangkan Infrastruktur Politik adalah Infrastruktur yang berhubungan dengan lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya secara langsung atau tidak saling berpengaruh. Sehingga lembaga tersebut mempengaruhi kebijakan lembaga negara. Sehingga tujuan dan fungsi infrastruktur politik sangat penting peranannya dalam bernegara. Dalam bermasyarakat terutama dalam sistem politiknya pasti banyak berbagai kepentingan. Hal ini harus ditengahi oleh negara agar menemukan titik yang dapat dijadikan solusi. Maka insfrakstruktur politik dapat menjadi solusi dari masalah tersebut melalui hadirnya partai politik sebagai penyambung lidah beragam kepentingan yang ada.

Adanya unsur sistem politik ini mampu melahirkan pemimpin yang sesuai kebutuhan. Secara sistem politik demokrasi misal di partai politik akan melahirkan wakil rakyat yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat secara umum. Dan lahirnya pemimpin melalui unsur ini melewati seleksi yang sudah tersedia, sehingga kompetensinya tidak dapat diragukan lagi. Beragamnya suara masyarakat butuh ruang untuk menyalurkan agar proses demokratisasi terus berjalan. Maka unsur ini menjadi proses sosialisasi politik dan komunikasi politik yang dapat menyalurkan hal tersebut. Dan bisa mengkomunikasikan antara masyarakat, golongan, institusi, dan berbagai sektor kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga negara

Politik pendidikan merupakan segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikian dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya. Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu negara yang berkenaan dengan pendidikan. Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan yang dijalankan demi tercapainya tujuan negara, karena tujuan negara menjadi sasaran

utama dalam penyelenggaraan pendidikan, maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. bahwa Pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru.[4] Penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya.[5]

Tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Pendidikan selalu selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat berkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan, siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Ketika sebuah rezim berkuasa selalu berusaha mencitrakan ataupun kerja keras yang serius untuk mempunyai nilai plus bagi rakyatnya. Dengan harapan akan terpilih kembali pada periode berikutnya. Itu sebuah kewajaran dari perjuangan politik.

Pendidikan dalam konteks ini dapat dijadikan nilai plus yang dapat diterima secara masif di seluruh pelosok, langsung menyentuh hajat hidup orang banyak dan hasilnya bisa dilihat di kemudian hari, atau dengan kata lain, tidak sekedar memberi tampilan yang baik tetapi dunia pendidikan adalah investasi besar untuk jangka panjang dan menengah. Stabilitas politik memainkan peran utama dalam menjelaskan tingkat kelangsungan hidup dalam pendidikan ketika digunakan sebagai prediktor tunggal atau, ketika diperkenalkan dalam analisis dengan PDB perkapita. Setelah temuan yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas rezim.[6]

Politik dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara meprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyatannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain.

---

[4] Borah, R.R.. *Impact of Politics and Concerns with the Indian Education System*. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 2012. hal. 91.

[5] Wales, J., Magee, A., Nicolai, S. *How does political context shape education reforms and their success*. Development Progress Dimension Paper. Vol. 06. August 2016. hal. 56.

[6] Nir, A.E. dan Kafle, B.S. *The effect of political stability on public education quality*. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013. hal. 113.

Ketidak konsistenan dalam pendanaan pendidikan meyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Kesalahan tersebut salah satunya dapat dilihat dari politik anggaran.[7]

Politik juga berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan. Jika jabatan profesionalitas guru disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal. UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1. Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setalah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersetifikat. Salah satu ketidak beresan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah adanya politik organisasi pendidikan dalam mempersiapkan guru profesional.[8] Stabilitas politik memainkan peran yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan keadaan ekonomi negara-negara yang terbukti dalam PDB per kapita.[9]

IV. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Serta politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, keduanya bahu membahu

[7] Sukasni, A. dan Efendy, H. *The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda*. International Journal of Education. Vol. 9. No. 3. 2017. hal. 183.

[8] *Ibid.,* hal. 185

dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

Politik juga berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam, perkembangan selanjutnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikian dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya. Dengan demikian politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara

Bibliografi

Albernethy, David dan Coombe, Trevor. Education and Politics in Developing Countries. Havard Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965

Borah, R.R.. Impact of Politics and Concerns with the Indian Education System. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 2012

Imam Barnadib. Filsafat Pendidikan; Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan. Yogyakarta: Studying, 1982

Nir, A.E. dan Kafle, B.S. The effect of political stability on public education quality. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013

Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia. 2006

Sukasni, A. dan Efendy, H. The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda. International Journal of Education. Vol. 9. No. 3. 2017

Wales, J., Magee, A., Nicolai, S. How does political context shape education reforms and their success. Development Progress Dimension Paper. Vol. 06. August 2016